

Jurnal Akuntansi Manajerial
ISSN (E): 2502-6704
Vol. 3, No. 1, Januari - Juni 2018: 42-53

Publikasi oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
<http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/JAM>

Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Agroindustri Melalui Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) Dalam Rangka Perluasan Kesempatan Kerja

Yeni Nuraeni

Puslitbang Kementerian Ketenagakerjaan

E-mail: yeninur@hotmail.com

ABSTRAK

Tingginya minat masyarakat Indonesia untuk mencari peluang kesempatan kerja di luar negeri salah satunya disebabkan karena belum berkembangnya budaya wirasaba dikalangan masyarakat pedesaan walaupun potensi sumber sumberdaya alam khususnya sektor pertanian cukup berlimpah untuk pengembangan UMKM berbasis agroindustri. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk memacu perkembangan UMKM di daerah kantong TKI adalah dengan program Desa Migran Produktif melalui kegiatan pengembangan usaha produktif dan pembentukan koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat potensi yang dimiliki daerah yang menjadi lokus program desmigratif untuk mengembangkan UMKM berbasis agroindustri. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui pengisian kuesioner dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan dari 111 desa yang diambil menjadi sampel, sebagian besar memiliki potensi sumberdaya alam yang berlimpah untuk mengembangkan UMKM berbasis agroindustri. Untuk keberhasilan program desmigratif diperlukan strategi untuk dapat mengintegrasikan program-program lintas Kementerian/Lembaga sesuai dengan program prioritas nasional. Optimalisasi keberadaan mitra lokal yang bersedia bekerjasama untuk mengsucceskan program desmigratif menjadi kunci keberhasilan pengembangan UMKM berbasis agroindustri di daerah-daerah kantong TKI.

Kata Kunci : UMKM, Desa Migran Produktif, Pengembangan Agroindustri

PENDAHULUAN

Keterbatasan kesempatan kerja di dalam negeri dan disparitas upah yang jauh berbeda dengan di luar negeri walaupun dengan jabatan yang sama merupakan faktor pendorong utama calon tenaga kerja untuk bekerja di luar negeri. Di sisi lain Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri belum mampu memanfaatkan hasil kerja yang mereka peroleh untuk usaha-usaha yang bersifat produktif, namun lebih berperilaku konsumtif, hal ini mendorong mereka untuk kembali bekerja ke luar negeri. Sementara keluarga yang ditinggalkan hanya mengharapkan gaji TKI (*remittance*) tanpa mengupayakan bagaimana memanfaatkan uang tersebut untuk mengembangkan usaha-usaha produktif.

Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) adalah upaya terobosan Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk memberdayakan, meningkatkan pelayanan serta memberi perlindungan bagi Calon TKI/TKI di desa yang menjadi kantong-kantong TKI (desa pengirim TKI terbanyak) dengan menawarkan program-program unggulan yang dibutuhkan oleh CTKI/TKI dan keluarganya melalui pemanfaatan potensi lokal dengan tidak mengabaikan karakteristik daerah setempat. Salah satu program desmigratif ini juga membidangi penciptaan usaha produktif melalui pelatihan usaha, pendampingan usaha serta bantuan sarana usaha produktif hingga pemasarannya. Melalui program dimaksud diharapkan

keluarga TKI mampu mengelola penghasilannya untuk menciptakan usaha-usaha produktif dalam skala mikro, kecil maupun menengah (UMKM).

Di samping itu juga program desmigratif dimaksudkan untuk membina dan mengarahkan masyarakat dalam rangka penguatan usaha produktif untuk jangka panjang dan kemudahan akses permodalan yang terorganisir yang dapat berbentuk koperasi usaha, *Baitul Mal Wat Thamwil* (BMT), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan bentuk lembaga keuangan lainnya yang menjadi inisiatif bersama dari masyarakat dan didukung oleh pemerintah. Untuk mewujudkan kemudahan dalam memperoleh modal usaha, salah satu program desmigratif adalah memfasilitasi pembentukan dan pengembangan koperasi/lembaga keuangan yang bertujuan untuk memperkuat usaha-usaha produktif masyarakat untuk jangka panjang dan berkelanjutan. Secara keseluruhan program desmigratif dapat dilihat pada gambar 1 berikut :



Gambar 1 : Program Desa Migram Produktif

Dari empat pilar yang diluncurkan pada program desmigratif, pilar 2 (pengembangan usaha produktif) dan pilar 4 (pembentukan koperasi desmigratif) memiliki tujuan utama untuk memberi peluang kepada masyarakat di daerah kantong TKI untuk dapat mengembangkan usaha mikro, kecil sampai menengah (UMKM) dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam setempat sehingga dapat mengurangi minat untuk mencari kerja di luar negeri khususnya di sektor informal (pengguna perseorangan), di mana TKI yang berkerja di sektor ini pada umumnya memiliki resiko tinggi karena tingkat perlindungan yang sangat minim baik dari pemerintah Indonesia sendiri maupun dari pemerintah negara penerima. Dengan berkembangnya UMKM di daerah kantong TKI diharapkan sekaligus dapat menciptakan lapangan kerja di dalam negeri.

Indonesia adalah negara agraris sehingga tidak bisa terlepas dari sektor pertanian. Sektor pertanian masih merupakan lapangan kerja terbesar penduduk Indonesia yaitu sebesar 32,87% pada bulan Agustus 2015 (BPS, 2016). Pembangunan di sektor pertanian masih banyak dilakukan di kawasan perdesaan dan merupakan sektor penyokong utama pertumbuhan ekonomi perdesaan. Pembangunan sektor pertanian di perdesaan yang dilaksanakan lebih banyak dikonsentrasikan

pada kegiatan produksi atau budidaya, yaitu melalui pemanfaatan sumberdaya alam (on-farm) khususnya tanaman pangan, sedangkan pembangunan sektor pertanian off-farm seperti pengembangan industri hulu pertanian, industri hilir pertanian, kegiatan pemasaran, serta jasa-jasa pendukungnya kurang mendapatkan perhatian. Pembangunan sektor pertanian yang hanya budidaya saja dan tidak disertai dengan kegiatan off-farm secara sinergi, menyebabkan sumbangan sektor pertanian kurang optimal dalam pembangunan ekonomi nasional. Secara umum sistem pertanian di wilayah perdesaan sampai sekarang masih menjadi rantai terlemah dari sistem ekonomi nasional, (Rosadi, Yanuar, et al, 2016) hal ini dapat dilihat dari Produk Domestik Bruto sektor pertanian yang relatif rendah dibandingkan dengan sektor yang lainnya yaitu 12,06% pada tahun 2014 (BPS, 2015).

Isu strategis yang saat ini berkembang dalam wacana pembangunan nasional adalah bagaimana upaya memperbesar skala kegiatan ekonomi pertanian, industri dan perdagangan dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat (Wida, 2011). Salah satu konsep yang digunakan adalah meningkatkan potensi sumberdaya lokal melalui agroindustri sehingga keterkaitan antar sektor tersebut dapat berkesinambungan atau terjalin keterkaitan yang tinggi antar sektor hulu, sektor antara dan sektor hilir (Vini A dan Siti Syamsiar, 2011). Pengembangan agroindustri sebagai subsektor kelanjutan dari sektor pertanian akan meningkatkan nilai tambah dan pada gilirannya akan dapat meningkatkan pendapatan petani, memperluas lapangan kerja serta meningkatkan pembangunan perdesaan pada umumnya. Dengan demikian, pengembangan agroindustri merupakan salah satu upaya untuk pemberdayaan ekonomi rakyat di Indonesia (Sumodiningrat, 2001).

Peran UMKM selama ini dinilai memiliki posisi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang dicirikan dengan kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, penyedia lapangan kerja terbesar, pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru dan sumber inovasi serta sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor (Wida, 2011).

UMKM di Indonesia mempunyai peranan yang penting sebagai penopang perekonomian. Fungsi utama UMKM dalam menggerakkan ekonomi Indonesia, yaitu (1) Sektor UMKM sebagai penyedia lapangan kerja bagi jutaan orang yang tidak tertampung di sektor formal, (2) Sektor UMKM mempunyai kontribusi terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), dan (3) Sektor UMKM sebagai sumber penghasil devisa negara melalui ekspor berbagai jenis produk yang dihasilkan sektor ini (Dwiana, 2011).

UMKM yang mempunyai potensi sumberdaya lokal berbasis agroindustri perlu mendapat perhatian yang serius mengingat sektor pertanian di Indonesia termasuk di daerah Kantong TKI masih menjadi tumpuan kehidupan bagi masyarakatnya. Pengembangan UMKM berbasis agroindustri akan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan para pelakunya. Untuk itu diperlukan kajian potensi UMKM berbasis agroindustri dan strategi mengembangkannya melalui pembiayaan (Wida 2011).

Untuk dapat memberi dukungan bagi tumbuhnya UMKM khususnya yang berbasis agroindustri di daerah-daerah kantong TKI yang menjadi sasaran dari program desmigratif, perlu dilakukan identifikasi terhadap potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan, potensi sumber daya manusia dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat sehingga program

desmigratif khusus pilar 2 dan pilar 4 dapat mencapai tujuan utamanya yaitu memberdayakan masyarakat setempat untuk menciptakan usaha-usaha baru maupun mengembangkan usaha yang telah dirintis.

Permasalahan pokok yang pada umumnya dihadapi dalam pengembangan UMKM berbasis agroindustri diantaranya berkaitan dengan lemahnya tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan SDM, terbatasnya akses ke sumber yang bisa memberikan bantuan modal, belum memiliki perencanaan dalam proses produksi sehingga menyebabkan tidak stabilnya harga komoditas, masih rendahnya kualitas dan tidak terjaminnya kontinuitas produksi yang diakibatkan belum terintegrasinya hulu dan hilir. Melalui program desmigratif khususnya pilar 2 dan pilar 4 pemerintah berusaha memberi dukungan kepada masyarakat di daerah Kantong TKI untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut di atas sehingga dapat mengembangkan usaha secara mandiri.

Berdasarkan permasalahan yang telah diungkapkan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Melakukan identifikasi potensi sumber daya alam untuk pengembangan UMKM yang berbasis agroindustri
2. Melakukan identifikasi lembaga-lembaga sosial ekonomi yang dapat mendukung pengembangan UMKM berbasis agroindustri
3. Merumuskan strategi pelaksanaan pelatihan, pembinaan, pemberdayaan dan pendampingan terhadap masyarakat untuk dapat menciptakan dan mengembangkan UMKM berbasis agroindustri secara berkelanjutan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang cocok diaplikasikan karena penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan situasi dan kondisi pada masa penelitian dilakukan (Dwiana, 2011). Penelitian dilaksanakan di 111 desa yang menjadi sasaran program desmigratif tahun 2017 tersebar di 10 Provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Jambi, Kalimantan Barat, Lampung, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur). Metoda pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui beberapa cara yaitu: (1) studi pustaka, (2) observasi lapangan, yakni melihat secara langsung ke lokasi desmigratif (3) menyebarkan kuesioner untuk masyarakat yang berkaitan dengan obyek program desmigratif khusus pilar 2 dan pilar 3 (4) wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, instansi/lembaga terkait. Data yang terkumpul dari hasil penyebaran kuesioner, wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder dilakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif untuk dapat menjawab permasalahan penelitian.

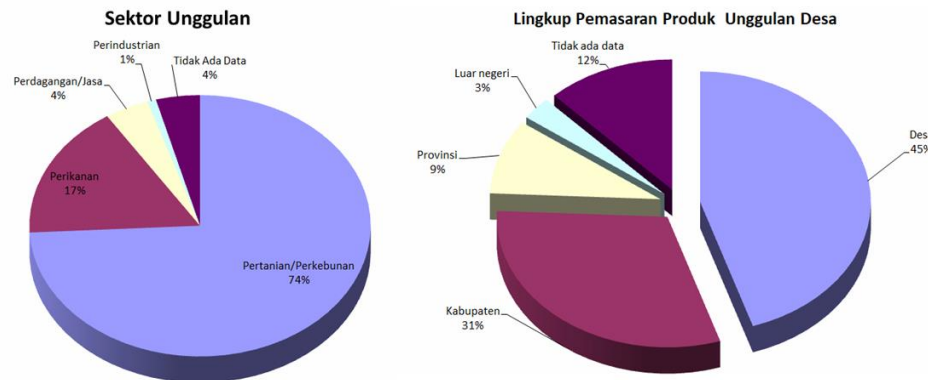
PEMBAHASAN

Kondisi Sumber Daya Alam di Desa Migran Produktif

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap 111 desa migran produktif terhadap potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi usaha produktif, sektor pertanian/perkebunan menempati urutan pertama terbesar yaitu 74% diikuti sektor perikanan sebesar 16%. Adapun komoditi unggulan yang sebagian besar sudah diolah menjadi bahan jadi terbanyak adalah dalam bentuk makanan dan minuman. Melihat kondisi potensi sumberdaya alam di daerah desa migran produktif, pengembangan UMKM berbasis agroindustri sangat potensial untuk memberi peluang

bagi masyarakat setempat untuk dapat mengembangkan usaha sekaligus memperluas kesempatan kerja.

Berdasarkan hasil observasi terhadap agroindustri yang telah dikembangkan masyarakat dapat diketahui permasalahan utama diantaranya adalah dari aspek pemasaran. Pemasaran produk sebagian besar baru melingkupi wilayah desa dan kabupaten, walaupun ada yang sudah berorientasi ke ekspor. Jenis sektor unggulan dan lingkup pemasaran produk unggulan dapat dilihat pada gambar 2 berikut :



Gambar 2 : Sektor Unggulan dan Lingkup Pemasaran Produk Unggulan di Desa Migran Produktif

Kondisi Mitra Lokal

Ketersediaan mitra lokal yang bersedia bekerja sama sangat penting untuk mendukung pelaksanaan program desmigratif. Dengan adanya mitra lokal dapat lebih mudah memotivasi dan menggerakkan masyarakat desa selain bantuan berupa penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan (Yeni, 2017). Berdasarkan hasil observasi di lapangan terdapat beberapa mitra lokal yang dapat diandalkan untuk membantu memberikan motivasi, pelatihan, pembinaan, pendampingan dan bantuan pemodal kepada masyarakat setempat untuk dapat membangun maupun mengembangkan usaha yang telah dirintis, di antaranya sebagai berikut :

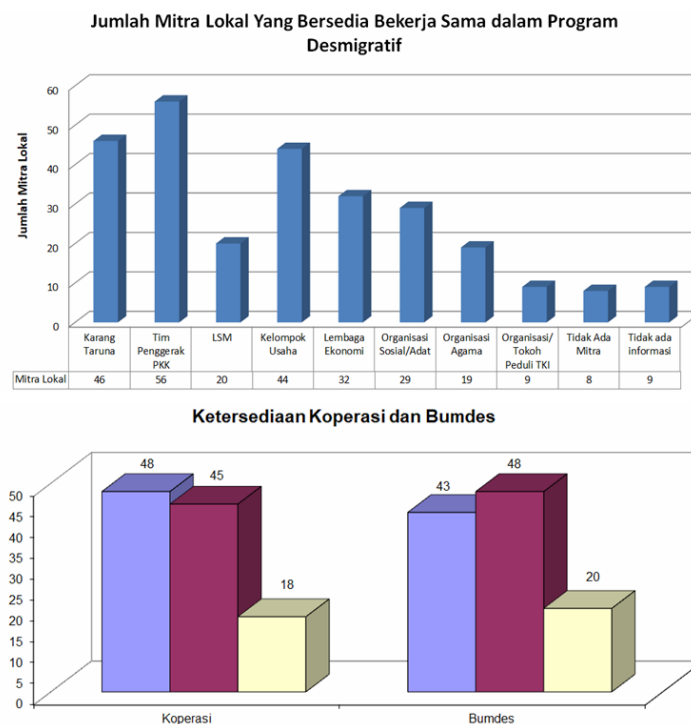
1. Lembaga kemasyarakatan berupa tim penggerak PKK dan Karang Taruna; diharapkan dapat membantu untuk memotivasi dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi pada setiap pelaksanaan kegiatan program desmigratif dalam rangka pengembangan UMKM berbasis agroindustri. Tim penggerak PKK akan lebih mudah melakukan pendekatan kepada ibu-ibu rumah tangga untuk dapat mengolah sumber daya alam yang berlimpah menjadi komoditi yang memiliki nilai tambah, sehingga dapat menambah penghasilan dan membuka lapangan pekerjaan. Karang Taruna akan lebih mudah melakukan pendekatan pada masyarakat usia muda untuk lebih kreatif dalam mengembangkan UMKM berbasis agroindustri sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran di kalangan usia muda
2. Lembaga Ekonomi dan Kelompok Usaha; Keberadaan Lembaga ekonomi berupa koperasi dan BUMDES diharapkan akan sangat berperan dalam membantu masyarakat untuk dapat membangun dan mengembangkan usahanya khususnya dalam permasalahan penyediaan bantuan modal dan upaya memperluas pemasaran produk usaha. Adapun kelompok usaha yang sudah terbentuk diharapkan dapat memberi bantuan untuk mendorong masyarakat yang sudah merintis usahanya untuk bergabung dalam komunitas dalam rangka memperbesar

skala usaha secara bersama-sama serta memberi motivasi berdasarkan pengalaman keberhasilan membangun usaha kepada masyarakat yang berminat untuk mulai membangun usahanya.

3. Organisasi sosial, adat dan agama; Pada umumnya memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat sehingga diharapkan dapat memotivasi dan menggerakkan masyarakat dalam upaya membangun dan mengembangkan usaha melalui kegiatan desmigratif yang dicanangkan pemerintah khususnya pilar 2 dan pilar 4
4. LSM dan tokoh peduli TKI; diharapkan dapat membantu memotivasi dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang difasilitasi oleh instansi/lembaga pemerintah maupun non pemerintah berkaitan dengan pengembangan UMKM berbasis agroindustri

Jumlah mitra lokal yang bersedia untuk bekerja sama dalam mensukseskan program desa migrant produktif dapat dilihat dalam gambar 3.

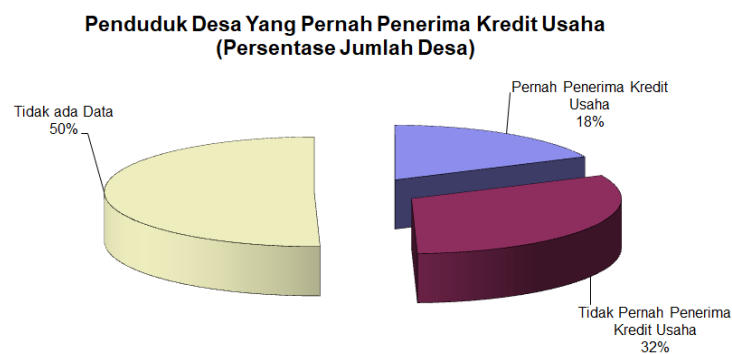
Dari data hasil observasi lapangan terlihat bahwa tim penggerak PKK menempati urutan terbanyak mitra lokal yang tersedia di desa migran produktif diikuti oleh kelompok usaha. Keberadaan mitra lokal ini sangat berpotensi untuk dapat menggerakkan masyarakat dalam pengembangan UMKM berbasis agroindustri. Ketersediaan lembaga ekonomi berupa Koperasi dan BUMDES masih sangat terbatas tidak sampai 50% desa migran produktif yang sudah memiliki kedua lembaga ekonomi yang diharapkan dapat memberi bantuan kepada masyarakat untuk akses permodalan maupun memperluas daerah pemasaran. Dengan adanya program desmigratif pilar 4 berupa pendirian maupun pengembangan koperasi desmigratif, diharapkan lembaga ekonomi ini dapat berfungsi secara maksimal.



Gambar 3 : Ketersediaan Mitra Lokal Yang Bersedia Bekerjasama Untuk Pengembangan UMKM Berbasis Agroindustri

Kondisi Penerima Kredit Usaha

Berdasarkan hasil observasi lapangan, dapat diketahui akses masyarakat untuk mendapatkan bantuan modal usaha dari lembaga ekonomi resmi sangat terbatas yaitu hanya 18% desa migran produktif yang masyarakatnya sudah pernah menerima kredit usaha, hal ini menunjukkan peran lembaga ekonomi pemerintah maupun swasta masih sangat minim menjangkau daerah-daerah kantong TKI. Dengan adanya program desmigratif khususnya pilar 4 Pembentukan Koperasi diharapkan peran koperasi akan lebih optimal dalam memberikan bantuan pinjaman modal kepada pelaku usaha produktif maupun bantuan berupa pemasaran hasil-hasil produksi dan bantuan lainnya (Yeni, 2017). Kondisi keterbatasan akses masyarakat untuk mendapat bantuan kredit usaha dapat dilihat pada gambar 4 berikut :



Gambar 4 : Penduduk Desa Yang Pernah Penerima Kredit Usaha

Strategi Pengembangan UMKM berbasis Agroindustri di Desa Migran Produktif

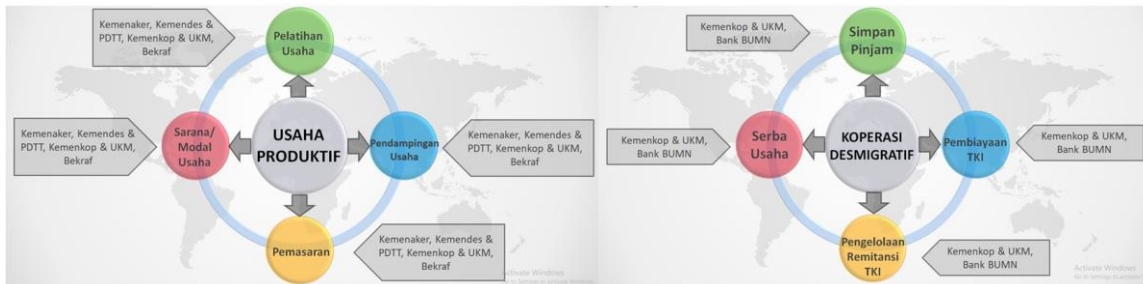
Program desmigratif khususnya pilar 2 (pengembangan usaha produktif) dan pilar 4 (pengembangan koperasi desmigratif) sangat strategis untuk mendukung masyarakat setempat mengembangkan UMKM berbasis agroindustri, dimana berdasarkan hasil survey lapangan sektor unggulan yang mendominasi adalah pertanian/perkebunan dan perikanan serta agroindustri yang sudah banyak dirintis oleh masyarakat setempat adalah industri makanan/minuman dari berbagai komoditi unggulan hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

Untuk pengembangan UMKM berbasis agroindustri melalui program desmigratif perlu merumuskan strategi untuk mengoptimalkan potensi yang ada dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi masyarakat diantaranya keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang kewirausahaan, kesulitan akses terhadap bantuan permodalan, dan keterbatasan lingkup pemasaran. Beberapa strategi yang perlu dirumuskan di antaranya adalah sebagai berikut :

Integrasi program lintas Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah maupun non Pemerintah

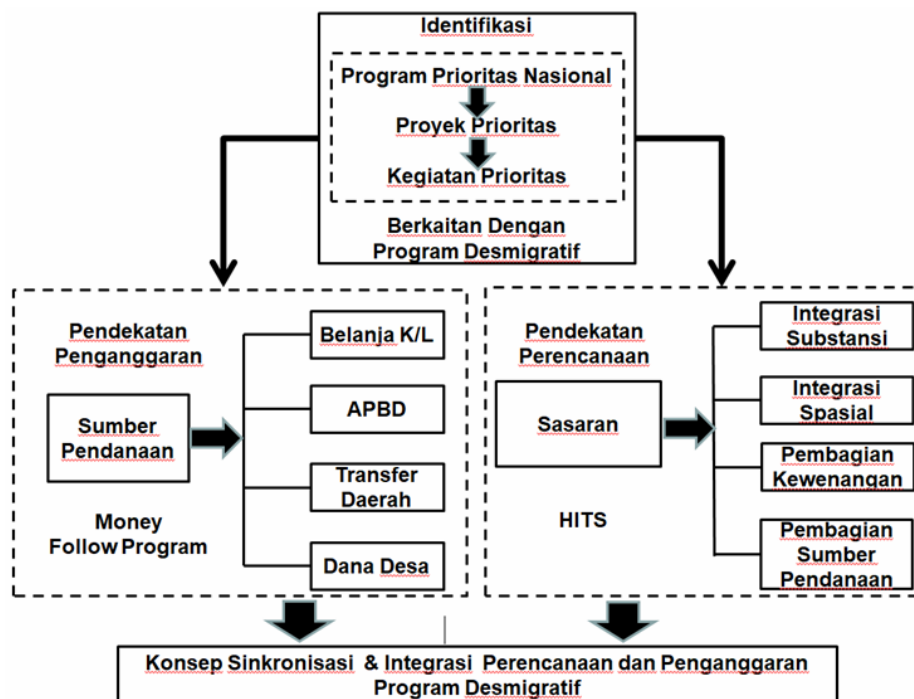
Untuk mencapai keberhasilan dari seluruh program Desmigratif kunci utamanya adalah terciptanya kerjasama, koordinasi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya sehingga program desmigratif merupakan sebuah program yang terpadu dan terintegrasi serta berkelanjutan yang menjadi tanggung jawab lembaga pemerintah, non pemerintah, LSM maupun masyarakat. Tanpa terjadinya kerjasama, koordinasi dan integrasi program, maka tujuan dari program desmigratif khususnya pilar 2 dan pilar 3 tidak mungkin tercapai. Konsep perencanaan awal untuk mengimplementasikan tujuan dari pilar 2 dan pilar 4 harus terjadi kerjasama dan

integrasi program lintas Kementerian lembaga/instansi terkait seperti terlihat pada gambar 5 sebagai berikut :



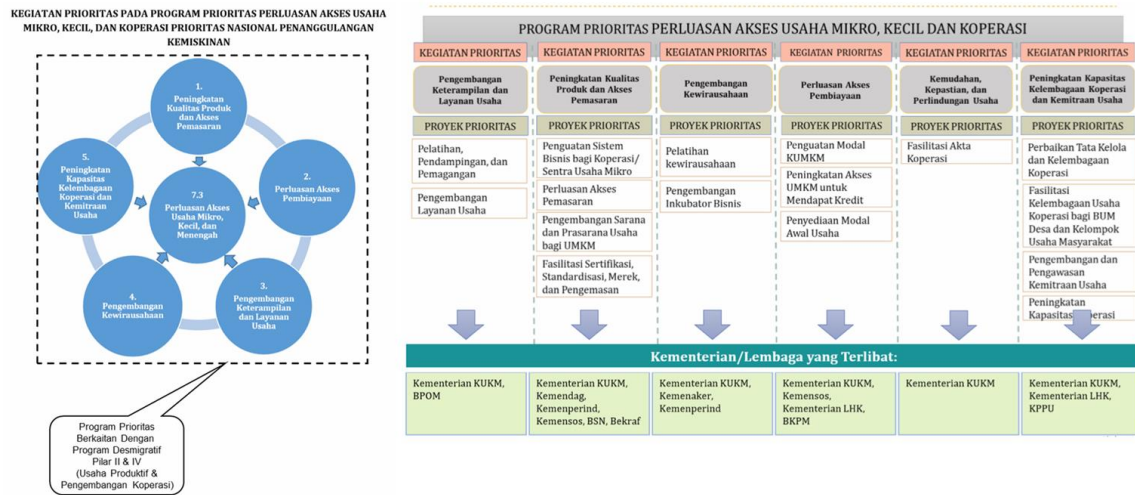
Gambar 5 : Integrasi Program Lintas K/L untuk Pelaksanaan Pilar 2 dan Pilar 3 Desmigratif

Agar Program Desmigratif dalam mendorong pengembangan UMKM berbasis agroindustri dapat terlaksana sesuai target dan tujuannya, diperlukan keterpaduan, sinergi dan integritas kewenangan dan hubungan kerja antar berbagai instansi pemerintah, baik antar Kementerian/Lembaga, antara Instansi Pusat dengan Daerah maupun antar Instansi Daerah serta dengan lembaga non pemerintah terkait lainnya. Keterpaduan, sinergitas dan integrasi ini sangat terkait dengan implementasi kebijakan yang menjadi sumber lahirnya kewenangan sektoral dan menjadi dasar mekanisme kerja antar instansi. Hal ini sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional yang menganut konsep *"Money Follow Program dan Pendekatan Perencanaan secara Holistik, Temanik, Integratif dan Spasial"*. Konsep integrasi program desmigratif dapat dilihat pada gambar 6 berikut :



Gambar 6 : Sinkronisasi & Integrasi Program Desmigratif

Sinkronisasi dan Integrasi Program Desmigratif khususnya berkaitan dengan pengembangan UMKM berbasis Agroindustri sudah selaras dengan program prioritas nasional tahun 2018 seperti terlihat pada gambar 7 berikut :



Gambar 7 : Prioritas Nasional Berkaitan Dengan Pengembangan UMKM
 Sumber : Bappenas

Implementasi sinkronisasi dan integerasi program pada umumnya sangat sulit untuk dilaksanakan sehubungan dengan ego sektoral masing-masing K/L. Kementerian Ketenagakerjaan yang berperan sebagai leader dalam program desmigratif harus pro aktif melakukan pendekatan untuk menjalin kerjasama melalui MOU dengan K/L terkait secara terus menerus dan berkelanjutan.

Sistem pelatihan, pembinaan, pendampingan usaha secara berkelanjutan

Keterbatasan tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan dalam bidang kewirausahaan menjadi hambatan bagi masyarakat untuk dapat membangun dan mengembangkan usaha produktif. Program prioritas nasional di bidang pendidikan memberi peluang bagi masyarkat untuk dapat meningkatkan pendidikan, pengetahuan dan keterampilannya dalam bidang kewirausahaan seperti terlihat pada gambar 8. Permasalahan dari pelaksanaan pelatihan kewirausahaan yang banyak dilaksanakan oleh berbagai pihak baik instansi pemerintah maupun non pemerintah adalah dari segi sinergitas dan keberlanjutan program. Masing-masing instansi/lembaga melakukan pelatihan sendiri-sendiri sehingga seringkali terjadi tumpang tindih serta tidak berkelanjutan. Proses pendampingan usaha sangat minim dilakukan. Sistem inkubasi bisnis merupakan salah satu metode pelatihan dan pendampingan usaha yang cukup efektif dan efisien untuk dapat mengantarkan masyarakat sampai dapat mendirikan usaha secara mandiri dan berkelanjutan.

Penerapan ekonomi digital di kalangan pelaku UMKM

Peningkatan penggunaan teknologi membawa dampak pada perubahan bentuk usaha secara signifikan. Perdagangan secara online lambat laun akan mengambil alih perdagangan secara komvensional, toko konvensional yang ada sudah mulai tergantikan dengan model bisnis *marketplace*. Pelaku UMKM harus dipersiapkan untuk memasuki era digital untuk dapat bersaing dan eksis dalam usahanya. Dengan penggunaan teknologi informasi akan memberi dampak pada perluasan daerah pemasaran produk yang selama ini menjadi permasalahan yang dihadapi oleh

pelaku usaha yang masih memasarkan produknya secara komvensional. Gambar 9 memperlihatkan betapa pentingnya pelaku UMKM untuk memasuki Era Digital. Untuk dapat mendorong pelaku UMKM memasuki era digital, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan di antaranya sebagai berikut :

- Meningkatkan kemampuan SDM dibidang Teknologi Informasi : dengan menyelenggarakan berbagai pelatihan berkaitan dengan Teknologi Informasi
- Meningkatkan keterampilan dalam melakukan teknik pemasaran secara online : karena era digital ini membelah target pasar menjadi digital natives (mereka yang lahir pada jaman digital dan berinteraksi dengan peralatan digital pada usia dini) dan digital imigrant (generasi yang mengenal dunia internet setelah mereka dewasa)
- Menguatkan Branding produk dengan meningkatkan value yang unik : Karena Brand menciptakan pelanggan melalui brand loyalty



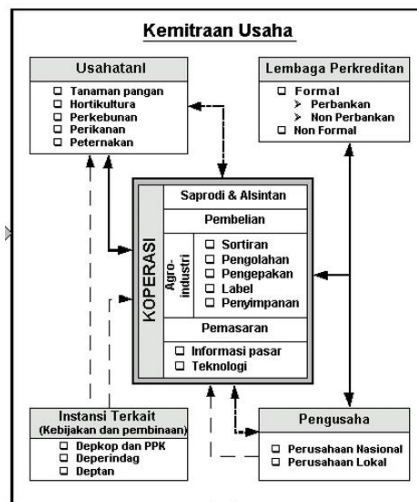
Gambar 8 : Prioritas Nasional Berkaitan Dengan Pelatihan Kewirusahaan
 Sumber : Bappenas



Gambar 9 : Alasan Pelaku UMKM Harus Go Digital

Mengefektifkan Lembaga Ekonomi dan Keuangan

Masalah permodalan masih merupakan permasalahan utama yang dihadapi pelaku UMKM untuk dapat terus eksis dan meningkatkan skala usahanya. Sulitnya menjangkau lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan yang legal untuk memperoleh bantuan permodalan, maka perlu dirumuskan model kemitraan usaha yang melibatkan berbagai pihak terkait untuk menjamin pelaku UMKM dapat terus mengembangkan usahanya. Bentuk kemitraan usaha seperti ditampilkan pada gambar 10, dapat dijadikan model dalam program desmigratif untuk mendukung tumbuhnya usaha produktif dengan kehadiran mitra usaha lokal dan pembentukan lembaga koperasi.



Gambar 10 : Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Berbasis Agribisnis (Syahza, 2003)

Untuk mengembangkan usaha agribisnis skala kecil perlu dibentuk koperasi. Tanpa koperasi tidak mungkin agribisnis kecil dapat berkembang. Koperasi inilah nantinya akan berhubungan dengan pengusaha besar (Bungaran Saragih, 2001b). Koperasi di pedesaan merupakan pilihan yang paling tepat. Koperasi merupakan salah satu jaminan pasar produk pertanian di pedesaan. Oleh karena itu petani harus mengutamakan produksi komoditi unggulan di daerahnya. Petani melakukan usahanya berdasarkan perjanjian dengan pihak koperasi sebagai penyedia dana. Lembaga perkreditan pada kegiatan agribisnis memegang peranan yang penting sebagai penyedia kredit kepada koperasi dan pengusaha. Kredit disalurkan melalui koperasi di pedesaan yang sudah mempunyai bentuk usaha agribisnis dan agroindustri. Koperasi mengajukan kredit untuk modal kerja bagi anggota (petani) dan modal kerja bagi koperasi itu sendiri (sebagai pelaku agroindustri). Sementara kredit kepada pengusaha bisa saja dalam bentuk pengembangan usaha (swalayan, toko, ekspor, penyediaan teknologi, dan lain sebagainya). Keterlibatan pihak pemerintah berkaitan dengan ketentuan dan peraturan yang saling menguntungkan pelaku agribisnis. Pembinaan diberikan kepada koperasi dan petani (Syahza, 2003).

DAFTAR PUSTAKA

- Almasdi Syahza. 2003. Rancangan Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Berbasis Agribisnis Di Daerah Riau Modeling Of Economic Empowerment Of Rural Community Based On Agro-Business Activities In Riau. *Jurnal Pembangunan Pedesaan*. 3 (2) : 121-132.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha 2015*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 2015*. Jakarta : BPS.
- Bungaran Saragih. 2001. *Membangun Sistem Agribisnis*. Bogor.Yayasan USESE.
- Dwiana Elis Ratnamurni. 2011. Kinerja Usaha Kecil Agroindustri Makanan Dan Minuman Di Jawa Barat . *Portofolio*. 8 (2) : 21 - 39
- Rosadi, M.Yanuar J Purwanto, Surjono H. Sutjahyo, Bambang Pramudya. 2016: Sistem Pengembangan Kelembagaan Agroindustri Pada Skala Kecil Dan Menengah. *Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum*. 8 (2) : 123-131.
- Sumodiningrat, G.2001 . *Responsi Pemerintah Terhadap Kesenjangan Ekonomi*. Jakarta. PT. Cipta Visi Mandiri
- Vini Arumsari. Siti Syamsiar. 2011 . Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Berbasis Agroindustri Lokal (Suatu Kajian Agroindustri Gula Kelapa Kristal di Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal SEPA*. 8 (1) : 35-41.
- Wida Erlyna Riptanti, SP. MP. 2011. *Potensi Umkm Berbasis Agroindustri Di Kabupaten Wonogiri Dan Strategi Pengembangannya Melalui Pembiayaan*. Lembaga Penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas Sebelah Maret.
- Nuraeni Yeni. 2017. Identifikasi dan Analisis Potensi Desa di Daerah Kantong TKI Dalam Rangka Pelaksanaan Program Desmigratif. *Jurnal Ketenagakerjan*. 12 (2) : 139-157.